

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang relatif besar dimana memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 15.434,2 triliun pada tahun 2020 (BPS, 2022), serta Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas banyak sekali wilayah provinsi, terdapat 34 provinsi yang memiliki peran sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, hal tersebut menjadikan misi besar untuk Indonesia agar masing-masing provinsi yang ada di wilayah Indonesia bisa berkembang. Pemerintah Indonesia harus memiliki strategi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi, dengan penerapan desentralisasi pada tiap wilayah diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang luar biasa. Keberhasilan proses kinerja pembangunan ekonomi disuatu negara maupun wilayah didasarkan pada salah satu indikator yaitu pertumbuhan ekonomi.

Jika produksi serta konsumsi produk serta jasa tumbuh dari tahun sebelumnya maka ekonomi akan dianggap tumbuh. Pertumbuhan suatu ekonomi memperlihatkan seberapa besar kegiatan ekonomi bisa memberikan pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat yang banyak sesuai dengan waktu, kemudian meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan apabila perekonomian negara maupun wilayah tersebut mengalami kemajuan yang berhasil. Terlihat pada gambar 1.1 dibawah apabila perkembangan terkait ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur berlandaskan tahun ke tahun terjadi kejadian naik turun maupun fluktuatif, dalam teori Keynes dikatakan jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu meningkatkan pengeluaran pemerintah, permintaan jumlah konsumsi, impor, ekspor, serta investasi. Terlihat pertumbuhan perkembangan terkait dengan ekonomi Provinsi Jawa Timur memiliki persentase yang angkanya lebih banyak jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Berlandaskan gambar 1.1 bisa ditunjukan apabila pertumbuhan terkait ekonomi cenderung stabil dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019 di angka 5, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan terkait ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami



Gambar 1.1

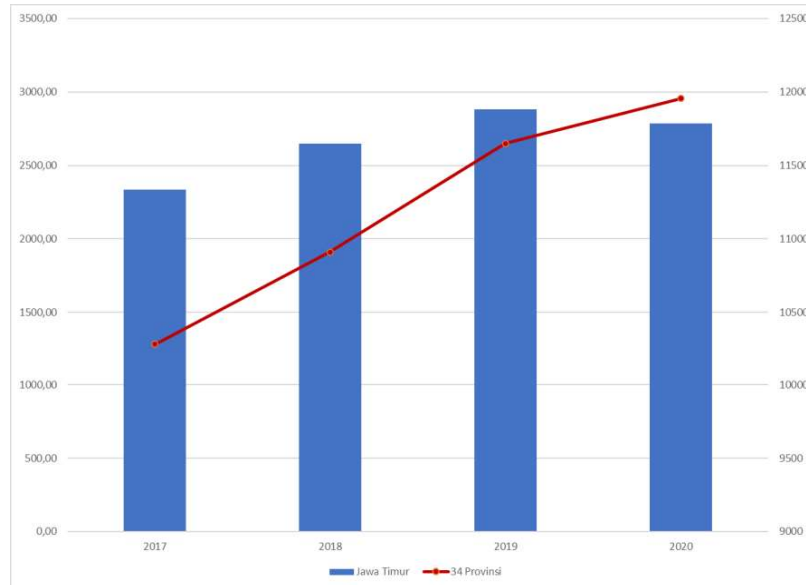
Laju PDRB Atas Dasar Biaya Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Timur serta Nasional (persen), 2012-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah, 2022)

penurunan hal tersebut diakibatkan adanya krisis dunia yaitu pandemi *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) membuat pertumbuhan terkait dengan ekonomi Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan secara nasional terkoreksi cukup dalam. Menurut Mangkoesoebroto (1998) dikatakan apabila pengeluaran pemerintah yaitu cara pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakannya.

Sukirno (2004) juga menjelaskan apabila pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu terkait dengan kebijakan fiskal apabila terkait tindakan pemerintah dalam mengelola perekonomiannya yang diatur dalam penerimaan serta pengeluaran pada APBN maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional yang dimiliki pemerintahan pusat serta APBD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dimiliki pemerintahan daerah. Disebutkan apabila terkait dengan kebijakan fiskal tersebut biasanya dipakai untuk menstabilkan biaya yang beredar, meningkatkan output produksi, menaikkan Partisipasi angkatan kerja, serta merangsang pertumbuhan terkait dengan ekonomi. Tingginya pengeluaran pada pemerintah bisa menjalankan kebijakannya hal ini juga akan memicu tingginya target yang pemerintah tetapkan, dengan terserapnya pengeluaran pemerintah

secara optimal berupa belanja pemerintah daerah, subsidi tersalurkan, hal ini bisa menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.



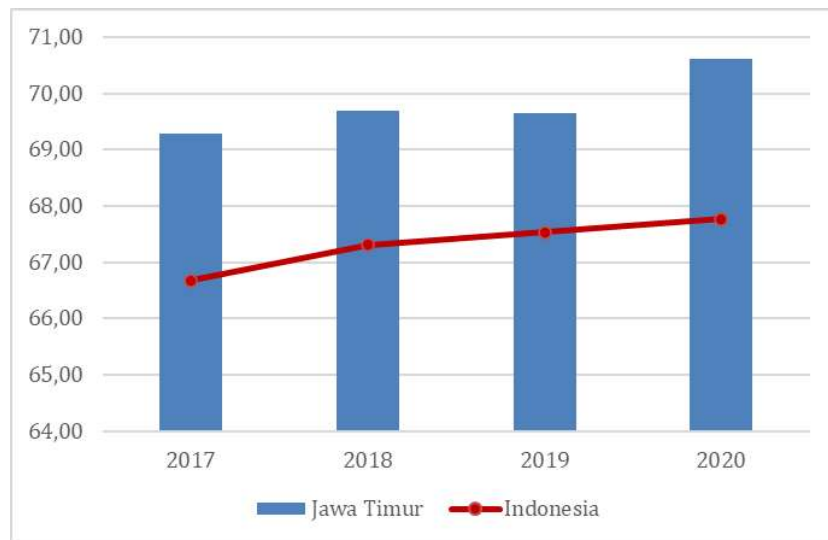
Gambar 1.2
Realisasi Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Provinsi Seluruh Indonesia (dalam milyar), 2017-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah, 2022)

Berlandaskan data yang dikumpulkan pada Gambar 1.2 realisasi rata-rata pengeluaran pemerintah provinsi di seluruh Indonesia mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari 11.648,67 milyar menjadi 11.956,97 milyar pada tahun 2020. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2020 tetapi mengalami koreksi pada tahun 2020. Dalam melaksanakan sistem desentralisasi pemerintah daerah berwenang mengelola secara mandiri sumber pendapatan serta belanja daerahnya, hal ini ditujukan agar memenuhi kebutuhan pada daerahnya serta diprioritaskan dalam pembangunan. APBD sendiri terdapat dua pos yaitu Belanja Langsung (*Direct Expenditure*) serta Belanja Tidak Langsung (*Indirect Expenditure*).

Menurut Sukirno (2004) pada teori pertumbuhan terkait dengan ekonomi yang disebut dengan Neo Klasik dikatakan apabila pertumbuhan terkait ekonomi memiliki ketergantungan dalam perkembangan sebuah faktor-faktor produksi

dimana tenaga kerja, teknologi, serta modal akan meningkatkan pertumbuhan terkait dengan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka hal tersebut menggambarkan keberhasilan pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut. Meningkatnya angkatan kerja didasarkan pada meningkatnya jumlah penduduk, hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang meninggi serta dikhawatirkan menimbulkan efek berlawanan pada pertumbuhan ekonomi.

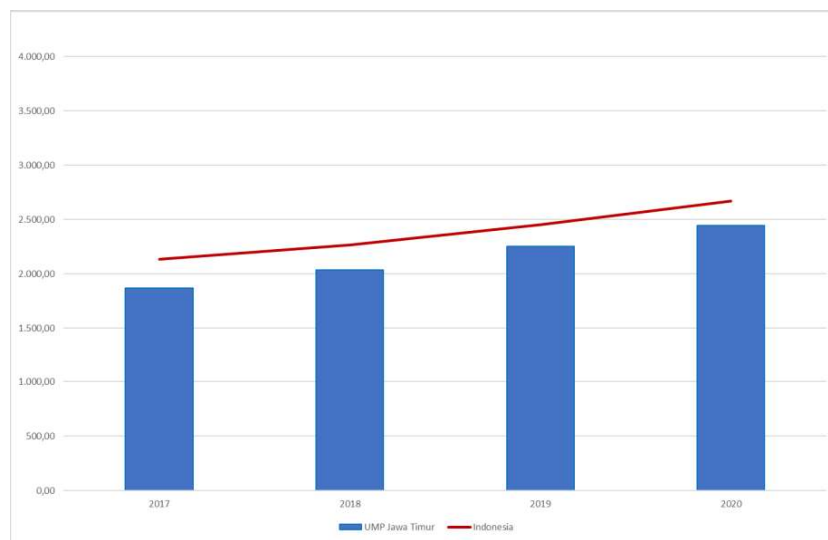


Gambar 1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur dan Indonesia
(dalam persen), 2019-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah,2022)

Menurut BPS (2022) dikatakan semakin meningkatnya TPAK apabila ketersediaan tenaga (*labour supply*) semakin banyak, hal ini jika terserap dengan baik maka kompetensi wilayah dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa semakin meningkat, angkatan kerja yang terserap sehingga menjadi tenaga kerja akan mendapatkan penghasilan untuk mengkonsumsi jasa serta barang yang dihasilkan oleh pekerja. Berlandaskan Gambar 1.3 menunjukan apabila tingkat Partisipasi pada angkatan kerja disetiap wilayah sangatlah tinggi, di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada Provinsi Jawa Timur angka Partisipasi pada angkatan kerja yang paling tinggi pada tahun 2019 berada pada Kabupaten Pacitan dengan persentase sebesar 79,62 persen serta naik pada tahun 2020 sebesar 80,36 persen. Pada tingkat kedua yaitu berada di

Kabupaten Bondowoso dengan persentase sebesar 76,01 persen di 2019 serta menurun di 2020 sejumlah 75,09 persen. Selanjutnya untuk tingkatan angka Partisipasi pada angkatan kerja terendah berada pada Kabupaten Bangkalan di 2019 sebesar 63,44 persen serta Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebesar 65,75 persen. Tenaga kerja yaitu salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi output jasa serta barang di daerah tersebut, output yang dihasilkan oleh tenaga kerja akan di konsumsi oleh masyarakat pada daerah tersebut hal ini memicu pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.4

Upah Minimum Provinsi Jawa Timur dan Indonesia (dalam ribu), 2019-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah, 2022)

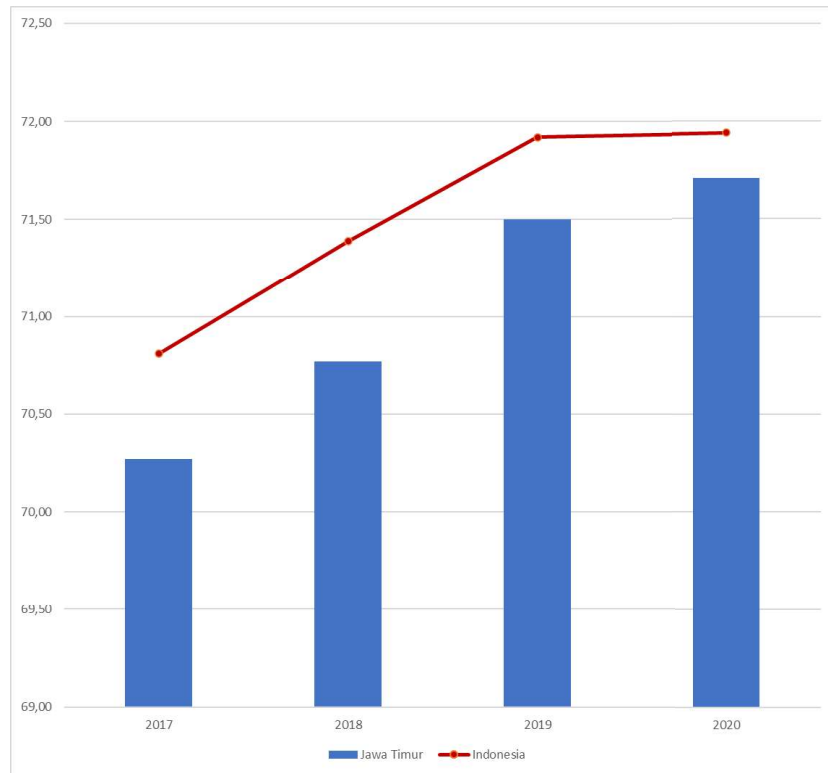
Berlandaskan Gambar 1.4 upah minimum yang diberikan oleh pemerintah mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi upah minimum di Provinsi Jawa Timur masih lebih rendah daripada Indonesia, di Provinsi Jawa Timur sendiri terlihat apabila upah minimum tiap kabupaten serta kota selain Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto mengalami perbedaan nominal yang cukup jauh. Pada tahun 2019 wilayah yang memiliki UMR maupun disebut Upah Minimum Regional paling tinggi pada Kota Surabaya dengan upah Rp 3.871.050 serta naik pada tahun 2020 sebesar Rp 4.200.480. Sedangkan wilayah yang memiliki UMR tertinggi kedua berada pada

wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan upah pada tahun 2019 sejumlah Rp 3.864.700 serta naik di 2020 sejumlah Rp 4.193.580. Wilayah dengan UMR terendah pada tahun 2019 berada pada Kabupaten Situbondo dengan upah Rp 1.763.270 serta pada tahun 2020 naik sebesar Rp 1.913.320.

Dampak dari penetapan upah minimum yaitu pekerja dengan upah rendah tidak bisa terlindung sebab upahnya tidak berada di bawah rata-rata upah nasional. Peningkatan pendapatan para pekerja ini bisa menurunkan jumlah jam kerja lembur mereka karena pendapatan mereka akan bertambah. Kenaikan upah minimum, di sisi lain, akan berefek terkait dengan penyerapan pada sektor tenaga kerja sebab akan menaikkan biaya di perusahaan maka menyebabkan perusahaan menghilangkan tenaga kerja. Pencarian tenaga kerja sangat penting sebab apabila sebuah daerah tenaga kerja kurang dimanfaatkan serta kemungkinan pekerjaan langka, pengangguran akan meningkat, yang mengakibatkan kemiskinan yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi terdapat faktor penting yaitu pembangunan manusia maupun modal manusia, menurut Sukirno (2004) jumlah penduduk yaitu salah satu dari empat indikator yang memengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Semakin bertambahnya total penduduk sehingga angkatan kerja secara otomatis bisa meningkat hal ini menciptakan persediaan akan tenaga kerja semakin banyak, tetapi dengan jumlah penduduk ataupun angkatan kerja yang banyak tetapi tidak diikuti dengan kualitas terkait sumber daya manusia yang handal akan menciptakan beban yang berat pada pertumbuhan bidang ekonomi. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berlandaskan Gambar 1.5 menunjukan terkait IPM maupun Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur lebih rendah daripada rata-rata IPM Indonesia. Terlihat kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur memiliki tingkat yang cukup tinggi, wilayah dengan IPM tertinggi berada di Kota Surabaya di 2019 senilai 82,22 persen serta naik di 2020 sebesar 82,23 persen. Wilayah kedua tertinggi yang memiliki IPM tertinggi berada di Kota Malang pada tahun



Gambar 1.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur dan Indonesia
(dalam persen), 2019-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah, 2022)

2019 memiliki IPM sebesar 81,32 persen serta naik pada tahun 2020 menjadi 81,45 persen. Sedangkan wilayah yang memiliki IPM terendah berada pada Kabupaten Sampang pada tahun 2019 wilayah tersebut memiliki IPM 61,94 persen serta naik pada tahun 2020 menjadi 62,70 persen. Walaupun Kabupaten Sampang memiliki angka IPM terendah diantara 38 kabupaten serta kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tetapi kenaikan IPM di 2019 menuju tahun 2020 Kabupaten Sampang tertinggi sebesar 0,76 persen dibandingkan kenaikan IPM Kota Surabaya senilai 0,01 persen serta Kota Malang senilai 0,13 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai fungsi penting saat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, kenaikan IPM pada wilayah-wilayah kota serta kabupaten di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan apabila pemerintahan kota maupun kabupaten yang memiliki komitmen serius

meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerahnya. Peningkatan IPM bisa membuat masyarakat memiliki angka tambah dalam memasuki dunia kerja, dimana masyarakat bisa menjalankan kegiatan produktifitas di wilayah tersebut.

Penjelasan tersebut maka penulis bertujuan menganalisa Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Regional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja serta Pengeluaran Pemerintah dalam memengaruhi pertumbuhan di bidang ekonomi di 38 kabupaten serta kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berlandaskan informasi tahun 2010 sampai dengan 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka penulis akan mengkaji studi berjudul: “Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2010-2020.”

1.2 Kesenjangan Penelitian

Studi sebelumnya oleh Munzir dkk. (2018) yang menyebutkan apabila pengeluaran oleh pemerintah, tenaga kerja serta investasi swasta baik yang simultan maupun parsial berefek signifikan serta signifikan terkait pertumbuhan bidang ekonomi di tempat peneliti. Mahrous (2017) meneliti serta menunjukkan apabila efek pengeluaran pemerintah terhadap output di Kenya tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kenya, terlihat pada rasio hutang pemerintah terhadap PDB, tingginya pembayaran utang, serta tingkat impor yang tinggi. Haryanto (2013) meneliti serta menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah dengan ditunjukkan pada belanja tidak langsung serta belanja mempunyai dampak kepada pertumbuhan perekonomian. Penelitian ini mengidentifikasi faktor yang memberikan efek pada pertumbuhan bidang ekonomi yang ada di provinsi Jawa Timur selama tahun 2010 – 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ini menganalisis faktor pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, upah minimum, serta tingkat partisipasi angkatan kerja apakah memengaruhi secara parsial maupun simultan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang dipakai yaitu OLS maupun Ordinary Least Square. Pemilihan metode yaitu FEM maupun Fixed Effect Model serta PLS maupun Pooled Least Square memakai tes Chow, sedangkan uji Hausman dipakai ketika mana yang dipilih antara metode FEM maupun metode Random Effect Model (REM). Uji signifikansi FEM untuk mengambil keputusan, untuk melaksanakan penambahan pada variabel dummy maupun tidak.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Pada studi akan memakai metode regresi data panel yang terkait pertumbuhan ekonomi variabel terikatnya. Sementara variabel bebas yakni pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, upah minimum, serta tingkat Partisipasi angkatan kerja.

- a) berlandaskan hasil estimasi, variabel pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, upah minimum, serta tingkat partisipasi angkatan kerja berefek signifikan terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur.
- b) berlandaskan hasil estimasi, variabel pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, upah minimum, serta tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan berefek signifikan kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur.

1.6 Kontribusi Riset

Studi berencana untuk berkontribusi mengetahui faktor yang memengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010 hingga 2020. Dengan memakai lima variabel serta memakai 38 kabupaten serta kota sehingga bisa membuat lebih banyak mengetahui faktor apa saja serta kebijakan apa saja yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bagian maupun bab yaitu: (1) Pendahuluan, (2) Tinjauan Pustaka, (3) Metode Penelitian, (4) Hasil serta Pembahasan, serta (5) Simpulan serta Saran.